BKPSDM Purwakarta

PERUBAHAN RENCANA KERJA

2022

KAMI ADA UNTUK ANDA

BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 61 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

b. bahwa sehubungan dengan adanya kebijakan nasional dan daerah serta penyelarasan pagu anggaran kegiatan yang bersumber dari Dana Transfer, maka Renja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati Purwakarta tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan

mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22, seri E);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3);
33. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 166 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 166);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta;
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta;
4. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
5. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan

pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah;

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah;
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Maksud disusunnya Perubahan Renja PD Tahun 2022 yaitu sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dan mensinkronisasikan perubahan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja perangkat daerah pada tahun berjalan berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2022.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Perubahan Renja PD Tahun 2022 yaitu :

a. sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
b. sebagai pelaksana teknis kegiatan prioritas pembangunan daerah;
c. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antar sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkatan pemerintahan berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2022;

d. sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan;

Pasal 4

(1) Sistematika penyusunan Perubahan Renja PD Tahun 2022 sebagai berikut :

a. BAB I PENDAHULUAN
b. BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
c. BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
d. BAB IV PENUTUP

(2) Uraian sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang pada masing-masing Perubahan Renja PD Kabupaten Purwakarta.

Pasal 5

Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Rumah Sakit Bayu Asih
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
6. Satuan Polisi Pamong Praja
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
9. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
11. Dinas Pangan dan Pertanian
12. Dinas Lingkungan Hidup
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
15. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

16. Dinas Perhubungan
17. Dinas Komunikasi dan Informatika
18. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
21. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
22. Dinas Perikanan dan Peternakan
23. Sekretariat Daerah
24. Sekretariat DPRD
25. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
26. Badan Keuangan dan Aset Daerah
27. Badan Pendapatan Daerah
28. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
29. Inspektorat
30. Kecamatan Jatiluhur
31. Kecamatan Sukasari
32. Kecamatan Maniis
33. Kecamatan Tegalwaru
34. Kecamatan Plered
35. Kecamatan Sukatani
36. Kecamatan Darangdan
37. Kecamatan Bojong
38. Kecamatan Wanayasa
39. Kecamatan Kiarapedes
40. Kecamatan Pasawahan
41. Kecamatan Pondoksalam
42. Kecamatan Purwakarta
43. Kecamatan Babakan Cikao
44. Kecamatan Campaka
45. Kecamatan Cibatu
46. Kecamatan Bungursari
47. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 16 Agustus 2022

BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 16 Agustus 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 61

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2022

BKPSDM

KABUPATEN PURWAKARTA

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Jl. Veteran Komp. Griya Hegarmanah Ciseureuh Purwakarta 41118
Telepon (0264) 201019, Faksimili (0264) 201019

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 telah selesai disusun. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berusaha melaksanakan berbagai kegiatan yang telah diprogramkan dalam Rencana Strategis Pembangunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan visi dan misi.

Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 ini dijadikan acuan dalam penyusunan APBD Perubahan Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 dan sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta ini jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat kami harapkan untuk perbaikan dimasa yang akan datang dan kami ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja ini.

Purwakarta, Agustus 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PURWAKARTA,

NORMAN NUGRAHA
NIP. 198311172006041009

DAFTAR ISI

		Halaman
Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Daftar Tabel		iii
I.	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	5
	1.4 Sistematika Penulisan	5
II.	EVALUASI RENJA TRIWULAN II TAHUN 2022	7
	2.1 Evaluasi Kinerja BKPSDM Kabupaten Purwakarta Triwulan II tahun 2021	7
	2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM Kabupaten Purwakarta	15
III.	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM	17
IV.	PENUTUP	31

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Capaian kinerja BKPSDM Kabupaten Purwakarta Tahun 2021	8
Tabel 2.2	Realisasi Keuangan BKPSDM Kabupaten Purwakarta Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022	9
Tabel 2.3	Evaluasi Pelaksanaan Program BKPSDM Kabupaten Purwakarta Tahun 2022	12
Tabel 3.1	Matriks Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2022	18

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja Perangkat Daerah (PD) merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang di persyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan PD pada khususnya, dan pembangunan daerah umumnya. Renja PD Perubahan memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Renja PD Perubahan merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Unit PD adalah unit pemberi masukan utama bagi penyusunan dokumen RKPD, RPJMD bahkan RPJPD. Renja PD Perubahan berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah. Kualitas penyusunan Renja PD Perubahan sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 252 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Oleh karenanya sebagai konsekuensi logis untuk mewujudkan kinerja aparatur profesional dalam menghadapi tuntutan masyarakat atas pelayanan yang tepat, mudah, transparan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan administrasi dalam lingkungan BKPSDM

Kabupaten Purwakarta diperlukan perencanaan yang benar-benar tepat guna dan terarah.

Selanjutnya Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 ini dijadikan acuan penyusunan rancangan APBD Perubahan Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 dan sebagai bahan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Seta Tata Cara Perubaham Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 252 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

16. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 60 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 60)

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 adalah adalah sebagai pedoman Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi institusi, memberikan info tentang perubahan rencana program kegiatan.

Penyusunan perubahan Rencana Kerja Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 menghasilkan acuan bagi arah kebijakan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang Kepegawaian Daerah agar terarah, efektif, efisien, dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan yang telah ditetapkan berdasarkan rencana kerja tahun 2022 dan Renstra (Rencana Strategik) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia Kabupaten Purwakarta.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Purwakarta mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Rencana Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sistematika Penulisan dokumen Rencana

kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB. I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan'
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB. II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

- 2.1 Evaluasi Kinerja BKPSDM Triwulan II Tahun 2020
- 2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM
- 2.3 Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan

BAB. III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM

BAB. IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Kinerja BKPSDM Kabupaten Purwakarta Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

Evaluasi pelaksanaan Renja ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pada Tahun 2022 Program Prioritas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta terdiri dari 3 (tiga) Program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 46 (empat puluh enam) Sub Kegiatan dengan Sumber Dana dari APBD Kabupaten purwakarta. Program yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta pada tahun 2022 mengacu pada tugas pokok dan fungsi, sesuai dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 252 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 meliputi:

Program Teknis Urusan Kepegawaian

1. Program Kepegawaian Daerah, dioperasionalkan ke dalam 4 (empat) Kegiatan dan terdiri dari 16 (enam belas) Sub Kegiatan.

Program Teknis Urusan Pendidikan dan pelatihan

1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, dioperasionalkan ke dalam 1 (satu) Kegiatan dan terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan.

Selain program tersebut di atas, pelaksanaan kinerja juga di tunjang oleh program pendukung kesekretariatan yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dioperasionalkan ke dalam 7 (tujuh) Kegiatan dan terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) Sub kegiatan.

Evaluasi capaian Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Capaian Kinerja BKPSDM Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
1.	Penerapan Sistem Merit	Sistem Merit	KATEGORI III BAIK	KATEGORI III BAIK	100%
2.	Mengelola dan mengembangkan Manajemen BKPSDM dengan menggunakan teknologi informasi	Persentase pemberian penghargaan ASN berprestasi/ berinovasi/ teladan/ dedikasi dan ASN Purna Bhakti / Pensiun	3,47	6,76	194,85
		Jumlah Sistem Manajemen Kepegawaian Berbasis teknologi informasi yang sudah di aplikasikan dengan baik	3	2	66,67
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan yang terintegrasi	Jumlah sistem pelayanan di bidang kepegawaian yang dapat diapilkasikan dengan baik	3	2	66,67

Anggaran yang tersedia untuk mendukung pencapaian kegiatan/ program/sasaran strategi akuntabilitas kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 48.002.957.632,- dengan realisasi keuangan sampai triwulan II sebesar Rp. 7.717.755.087,- dengan rincian Anggaran dan Realisasi persubkegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.2 Realisasi Keuangan BKPSDM Kabupaten Purwakarta sampai dengan Triwulan II tahun 2022

NO	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
1	2	3	4	5
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**40.764.360.782**	**6.417.083.937**	**15,74**
1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**473.910.500**	**80.712.400**	**17,03**
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	99.941.200	25.390.600	25,41
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.045.600	11.823.600	78,59
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15.013.000	0	0,00
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.042.700	13.919.400	69,45
5.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	323.868.000	29.578.800	9,13
1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**36.554.683.806**	**5.104.987.537**	**13,97**
6.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	36.516.540.406	5.093.209.937	13,95
7.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.999.600	11.777.600	78,52
8.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	23.143.800	0	0,00
1.3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**15.000.000**	**0**	**0,00**
9.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	15.000.000	0	0,00
1.4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**184.089.000**	**41.950.000**	**22,79**
10.	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	84.089.000	0	0,00
11.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000	0	0,00
12.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	50.000.000	41.950.000	83,90
1.5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.474.799.044**	**530.815.550**	**35,99**
13.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	70.002.900	48.235.650	68,91
14.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99.794.100	99.234.000	99,44

NO	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
1	2	3	4	5
15.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	51.964.350	29.844.250	57,43
16.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	225.000.000	46.447.000	20,64
17.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	101.987.900	44.123.000	43,26
18.	Penyediaan Bahan/Material	166.899.794	89.366.100	53,54
19.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	150.000.000	27.852.000	18,57
20.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	304.150.000	30.983.950	10,19
21.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	115.000.000	114.729.600	99,76
22.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	190.000.000	0	0,00
1.6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.562.028.432**	**524.752.125**	**33,59**
23.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	2.000.000	66,67
24.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	468.798.400	88.751.354	18,93
25.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.090.230.032	434.000.771	39,81
1.7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**499.850.000**	**133.866.325**	**26,78**
26.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	127.200.000	59.154.325	46,50
27.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.150.000	35.475.000	70,74
28.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	250.000.000	0	0,00
29.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	72.500.000	39.237.000	54,12
2.	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**4.501.676.850**	**1.075.099.650**	**23,88**
2.1	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**853.761.450**	**258.944.300**	**30,33**
30.	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	378.800.050	59.882.800	30,33
31.	Evaluasi Pemberhentian ASN	274.965.400	197.302.500	71,76
32.	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	199.996.000	1.759.000	0,88
2.2	**Mutasi dan Promosi ASN**	**1.929.954.450**	**647.566.450**	**33,55**
33.	Pengelolaan Mutasi ASN	99.956.000	1.500.000	1,50
34.	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	199.998.550	98.066.850	49,03

NO	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
1	2	3	4	5
35.	Pengelolaan Promosi ASN	1.629.999.900	547.999.600	33,62
2.3	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**667.961.650**	**85.126.150**	**12,74**
36.	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	139.999.850	74.505.850	53,22
37.	Pengelolaan Assessment Center	249.999.900	0	0,00
38.	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	227.962.950	3.110.950	1,36
39.	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	49.998.950	7.509.350	15,02
2.4	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**1.049.999.300**	**83.462.750**	**7,95**
40.	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	499.999.850	5.559.850	1,11
41.	Pembinaan Disiplin ASN	449.999.850	39.674.800	8,82
42.	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	99.999.600	38.228.100	38,23
3.	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**2.736.920.000**	**225.571.500**	**8,24**
3.1	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**2.736.920.000**	**225.571.500**	**8,25**
43.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2.736.920.000	225.571.500	8,25
Jumlah		**48.002.957.632**	**7.717.755.087**	**16,08**

Penyerapan anggaran sampai dengan triwulan II adalah sebesar 16,08%. Kecilnya penyerapan anggaran sampai triwulan II dikarenakan adanya refocusing anggaran.

Lebih lanjut pencapaian kinerja Renja dapat dilihat pada table Evaluasi Kinerja Per Triwulan II (terlampir).

Tabel 2.3
EVALUASI PELAKSANAAN POGRAM
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022

Kode	Bidanf Urusan Pemerintahan dan Program Perioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (2022) Tahun yang dievaluasi (Parsial 1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2022) Tahun yang dievalausi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Catatan/ Permasalahan
				Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.03.5.04.0.00.01.00	**Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**				**48.002.957.632**		**7.717.755.087**	**8,42**	**16,08**	
5.03	**Kepegawaian**				**45.266.037.632**		**7.492.183.587**	**10,36**	**16,55**	
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota				40.764.360.782		6.417.083.937		15,74	
		1. Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	BB		A		112,50		
		2. Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	90,00		0,00		0,00		
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah				4.501.676.850		1.075.099.650		23,88	
		1. Persentase Penurunan Indisipliner Pegawai	Persen	3,33		70,00		4,76		
		2. Persentase Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kepegawaian yang Disosialisasikan	Persen	10,00		0,00		0,00		

Kode	Bidanf Urusan Pemerintahan dan Program Perioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (2022) Tahun yang dievaluasi (Parsial 1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2022) Tahun yang dievalausi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Catatan/ Permasalahan
				Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3. Persentase Sistem Aplikasi Kinerja	Persen	100,00		0,00		0,00		
		4. Persentase ASN Berprestasi/ Berinovasi/ Teladan dan Berdesikasi yang Mendapat Prnghargaan	Persen	1,28		0,00		0,00		
		5. Persentase ASN Purna Bhakti/ Pensiun yang Mendapat Penghargaan dan Tepat Waktu	Persen	4,23		0,00		0,00		
		6. Persentase Pengadaan ASN sesuai Kebutuhan Formasi Pegawai	Persen	0,35		0,00		0,00		
		7. Persentase Pengisisan Pemangku Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrastor, dan Jabatan Pengawas	Persen	100,00		0,24		0,24		
		8. Persentase Penataan ASN sesuai dengan Kompetensi	Persen	100,00		0,00		0,00		
		9. Persentase Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Tepat Waktu	Persen	100,00		17,20		17,20		
		10. Persentase Data ASN yang Mutakhir	Persen	100,00		0,00		0,00		
		11. Persentase Integrasi Aplikasi Kepegawaian	Persen	100,00		0,00		0,00		

Kode	Bidanf Urusan Pemerintahan dan Program Perioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (2022) Tahun yang dievaluasi (Parsial 1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2022) Tahun yang dievalausi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Catatan/ Permasalahan
				Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.04	**Pendidikan dan Pelatihan**				**2.736.920.000**		**225.571.500**	**0,00**	**8,24**	
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia				2.736.920.000		225.571.500		8,24	
		1. Persentase Calon ASN yang telah mengikuti Pelatihan Dasar	Persen	100,00		0,00		0,00		
		2. Persentase ASN yang Diklat Fungsional/ Teknis/Bimtek/Seminar/ Lokakarya dan Tugas Belajar	Persen	1,53		0,00		0,00		
		3. Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	Persen	12,15		0,00		0,00		

2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM Kabupaten Purwakarta

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen melaksanakan reformasi birokrasi untuk mewujudkan Birokrasi Kelas Dunia, melalui perubahan mendasar dalam manajemen ASN, yakni penerapan sistem merit sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU-ASN). Peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi bagian penting dalam reformasi birokrasi. ASN memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Kunci efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan birokrasi, sangat tergantung pada kompetensi, kualitas dan kinerja para Aparatur Sipil Negara. Penerapan sistem merit dalam manajemen ASN sebagaimana amanat UU-ASN telah menjadi kebutuhan dasar bagi pemerintah untuk menopang tata kelola pemerintahan agar berjalan secara efektif.

Sejalan hal tersebut, disadari bahwa perkembangan teknologi dalam wujud revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan yang cepat yang berdampak pada tata kelola pemerintahan. Dalam rangka mengantisipasi perubahan global yang cepat, pemerintah harus membangun tata kelola pemerintahan yang lebih dinamis (*dinamic governance*). Dalam penyelenggaraan pemerintahan, dituntut mampu menyesuaikan kebijakan dengan perubahan lingkungan global yang cepat dan tidak menentu sehingga tujuan negara tetap dapat diwujudkan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memperbaiki tata kelola pemerintahan yang ada dengan memberi perhatian kepada pembangunan SDM aparatur.

Mengingat bahwa kualitas tata kelola pemerintahan sangat dipengaruhi kualitas aparatur sipil negara, maka hal tersebut juga sekaligus memperlihatkan bahwa kualitas manajemen dan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) harus terus ditingkatkan, apalagi dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Birokrasi pemerintah pada era industri 4.0 dan transformasi digital ini dituntut mampu memberikan

pelayanan cepat dan responsif, inovatif, kolaboratif dan adaptif terhadap perkembangan global yang sangat cepat.

Isu-isu pelayanan kepegawaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil bahwa peraturan tersebut mengatur manajemen kepegawaian Pegawai Negeri Sipil mulai dari proses pengadaan sampai dengan pemberhentian pegawai.

Dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 pembangunan bidang pemerintahan Aspek Aparatur diarahkan pada pemantapan profesionalitas aparatur dalam pelayanan publik yang didukung oleh sistem dan standar pelayanan yang teruji. Fokus perhatian yang menjadi isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta adalah :

1. Penataan Manajemen Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan dengan menerapkan sistem merit sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, wama kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pemikahan, umur dan atau kondisi kecacatan maka dapat mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Pengelolaan pelayanan informasi dan administrasi kepegawaian secara elektronik yang dibangun melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian guna mengoptimalkan pelayanan publik di era revolusi industri 4.0.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan startegi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka Langkah operasional yang harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta, dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Suatu Program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi Organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategi yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, outcome maupun impact sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Selanjutnya rician program dan kegiatan BKPSDM Kabupaten Purwakarta lebih lengkap dapat di lihat pada Tabel Matriks Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dibawah ini :

Tabel 3.1
MATRIKS PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	SEBELUM PERUBAHAN								SETELAH PERUBAHAN								Keterangan	Perangkat Daerah
				Lokasi	Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Prioritas Pembangunan Nasional	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																				
5.3	**KEPEGAWAIAN**										**45.266.037.632**								**46.591.037.632**		
5.3.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**										**40.764.360.782**								**41.189.360.782**		
5.3.1.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**473.910.500**								**473.910.500**		
5.3.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	BB; 90 Opini; Persen	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	4 dokumen	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100%	99.941.200	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	BB; 90 Opini; Persen	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	4 dokumen	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100%	99.941.200	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM
5.3.1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	BB; 90 Opini; Persen	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang di susun	1 Dokumen	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100%	15.045.600	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	BB; 90 Opini; Persen	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang di susun	1 Dokumen	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100%	15.045.600	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM
5.3.1.2.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	BB; 90 Opini; Persen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Yang Tersusun	1 Dokumen	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100%	15.013.000	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	BB; 90 Opini; Persen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Yang Tersusun	1 Dokumen	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100%	15.013.000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM
5.3.1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	BB; 90 Opini; Persen	Jumlah Dokumen LAKIP yang disusun	1 Dokumen	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100%	20.042.700	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	BB; 90 Opini; Persen	Jumlah Dokumen LAKIP yang disusun	1 Dokumen	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100%	20.042.700	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM
5.3.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	BB; 90 Opini; Persen	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100%	323.868.000	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	BB; 90 Opini; Persen	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100%	323.868.000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM
5.3.1.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**36.554.683.806**								**36.054.683.806**		
5.3.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	BB; 90 Opini; Persen	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang	Meningkatnya kualitas dokumen laporan keuangan yang disusun	100%	36.516.540.406	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	BB; 90 Opini; Persen	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang	Meningkatnya kualitas dokumen laporan keuangan yang disusun	100%	36.016.540.406	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	SEBELUM PERUBAHAN								SETELAH PERUBAHAN								Keterangan	Perangkat Daerah
				Lokasi	Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Prioritas Pembangunan Nasional	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
5.3.1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	BB; 90 Opini; Persen	Jumlah dokumen Pelaporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	Meningkatnya kualitas dokumen laporan keuangan yang disusun	100%	14.999.600	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	BB; 90 Opini; Persen	Jumlah dokumen Pelaporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	Meningkatnya kualitas dokumen laporan keuangan yang disusun	100%	14.999.600	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM
5.3.1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	BB; 90 Opini; Persen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD yang disusun yang disusun	1 Dokumen	Meningkatnya kualitas dokumen laporan keuangan yang disusun	100%	23.143.800	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	BB; 90 Opini; Persen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD yang disusun yang disusun	1 Dokumen	Meningkatnya kualitas dokumen laporan keuangan yang disusun	100%	23.143.800	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM
5.3.1.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**										**15.000.000**								**15.000.000**		
5.3.1.2.03.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	BB; 90 Opini; Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	1 Dokumen	Meningkatnya Kualitas Kebutuhan Dokumen Pelaporan Barang Milik Daerah Yang Diperlukan	100%	15.000.000	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	BB; 90 Opini; Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	1 Dokumen	Meningkatnya Kualitas Kebutuhan Dokumen Pelaporan Barang Milik Daerah Yang Diperlukan	100%	15.000.000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM
5.3.1.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**										**184.089.000**								**184.089.000**		
5.3.1.2.05.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	BB; 90 Opini; Persen	Jumlah Ruangan yang disediakan	1 Ruangan	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	0	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	BB; 90 Opini; Persen	Jumlah Ruangan yang disediakan	1 Ruangan	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	0	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM
5.3.1.2.05.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	BB; 90 Opini; Persen	Jumlah Peserta yang Mengikuti Kegiatan Rakoor Kepegawaian	50 Orang	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	84.089.000	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	BB; 90 Opini; Persen	Jumlah Peserta yang Mengikuti Kegiatan Rakoor Kepegawaian	50 Orang	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	84.089.000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM
5.3.1.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	BB; 90 Opini; Persen	Jumlah Peserta yang Mengikuti Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	47 Orang	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	50.000.000	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	BB; 90 Opini; Persen	Jumlah Peserta yang Mengikuti Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	47 Orang	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	50.000.000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM
5.3.1.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	BB; 90 Opini; Persen	Jumlah Peserta yang Mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	50.000.000	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	BB; 90 Opini; Persen	Jumlah Peserta yang Mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	50.000.000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM
5.3.1.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**1.474.799.044**								**1.499.799.044**		
5.3.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	BB; 90 Opini; Persen	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	26 jenis	Meningkatnya Pelayanan Jasa Penunjang Kantor	100%	70.002.900	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	BB; 90 Opini; Persen	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	26 jenis	Meningkatnya Pelayanan Jasa Penunjang Kantor	100%	70.002.900	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	SEBELUM PERUBAHAN								SETELAH PERUBAHAN								Keterangan	Perangkat Daerah
				Lokasi	Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Prioritas Pembangunan Nasional	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
5.3.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	BB; 90 Opini; Persen	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 Jenis	Meningkatnya Pelayanan Jasa Penunjang Kantor	100%	99.794.100	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	BB; 90 Opini; Persen	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 Jenis	Meningkatnya Pelayanan Jasa Penunjang Kantor	100%	99.794.100	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM
5.3.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	BB; 90 Opini; Persen	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	46 Item	Meningkatnya Pelayanan Jasa Penunjang Kantor	100%	51.964.350	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	BB; 90 Opini; Persen	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	46 Item	Meningkatnya Pelayanan Jasa Penunjang Kantor	100%	51.964.350	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM
5.3.1.2.06.1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	BB; 90 Opini; Persen	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5 Jenis	Meningkatnya Pelayanan Jasa Penunjang Kantor	100%	225.000.000	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	BB; 90 Opini; Persen	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5 Jenis	Meningkatnya Pelayanan Jasa Penunjang Kantor	100%	250.000.000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM
5.3.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	BB; 90 Opini; Persen	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	14 Item	Meningkatnya Pelayanan Jasa Penunjang Kantor	100%	101.987.900	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	BB; 90 Opini; Persen	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	14 Item	Meningkatnya Pelayanan Jasa Penunjang Kantor	100%	101.987.900	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM
5.3.1.2.06.7	Penyediaan Bahan/Material	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	BB; 90 Opini; Persen	Jumlah Bahan/Material yang disediakan	57 Jenis ATK	Meningkatnya Pelayanan Jasa Penunjang Kantor	100%	166.899.794	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	BB; 90 Opini; Persen	Jumlah Bahan/Material yang disediakan	57 Jenis ATK	Meningkatnya Pelayanan Jasa Penunjang Kantor	100%	166.899.794	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM
5.3.1.2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	BB; 90 Opini; Persen	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu yang disediakan	8 Jenis	Meningkatnya Pelayanan Jasa Penunjang Kantor	100%	150.000.000	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	BB; 90 Opini; Persen	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu yang disediakan	8 Jenis	Meningkatnya Pelayanan Jasa Penunjang Kantor	100%	150.000.000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM
5.3.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	BB; 90 Opini; Persen	Jumlah fasilitasi kegiatan rapat dan konsultasi yang di butuhkan	1 Tahun	Meningkatnya Pelayanan Jasa Penunjang Kantor	100%	304.150.000	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	BB; 90 Opini; Persen	Jumlah fasilitasi kegiatan rapat dan konsultasi yang di butuhkan	1 Tahun	Meningkatnya Pelayanan Jasa Penunjang Kantor	100%	304.150.000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM
5.3.1.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	BB; 90 Opini; Persen	Penyediaan Arsip Dinamis BKPSDM	1 Paket	Meningkatnya Pelayanan Jasa Penunjang Kantor	100%	115.000.000	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	BB; 90 Opini; Persen	Penyediaan Arsip Dinamis BKPSDM	1 Paket	Meningkatnya Pelayanan Jasa Penunjang Kantor	100%	115.000.000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	SEBELUM PERUBAHAN								SETELAH PERUBAHAN								Keterangan	Perangkat Daerah
				Lokasi	Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Prioritas Pembangunan Nasional	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
5.3.1.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	BB; 90 Opini; Persen	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Sistem	Meningkatnya Pelayanan Jasa Penunjang Kantor	100%	190.000.000	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	BB; 90 Opini; Persen	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Sistem	Meningkatnya Pelayanan Jasa Penunjang Kantor	100%	190.000.000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM
5.3.1.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										**0**								**900.000.000**		
5.3.1.2.07.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	BB; 90 Opini; Persen	Kendaraan Roda 2 Kendaraan Roda 4	0	Meningkatnya Jumlah Asset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Yang Dibutuhkan	100%	0	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	BB; 90 Opini; Persen	Kendaraan Roda 2 Kendaraan Roda 4	2 Unit 2 Unit	Meningkatnya Jumlah Asset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Yang Dibutuhkan	100%	900.000.000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM
5.3.1.2.07.5	Pengadaan Mebel	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	BB; 90 Opini; Persen	Jumlah pengadaan mebel yang diadakan	4 Jenis	Meningkatnya Jumlah Asset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Yang Dibutuhkan	100%	0	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	BB; 90 Opini; Persen	Jumlah pengadaan mebel yang diadakan	4 Jenis	Meningkatnya Jumlah Asset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Yang Dibutuhkan	100%	0	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM
5.3.1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	BB; 90 Opini; Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	2 jenis	Meningkatnya Jumlah Asset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Yang Dibutuhkan	100%	0	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	BB; 90 Opini; Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	2 jenis	Meningkatnya Jumlah Asset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Yang Dibutuhkan	100%	0	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM
5.3.1.2.07.9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	BB; 90 Opini; Persen	Jumlah Pembangunan Gedung Kantor Yang Tersedia	1 Gedung	Meningkatnya Jumlah Asset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Yang Dibutuhkan	100%	0	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	BB; 90 Opini; Persen	Jumlah Pembangunan Gedung Kantor Yang Tersedia	1 Gedung	Meningkatnya Jumlah Asset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Yang Dibutuhkan	100%	0	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM
5.3.1.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	BB; 90 Opini; Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	2 Jenis	Meningkatnya Jumlah Asset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Yang Dibutuhkan	100%	0	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	BB; 90 Opini; Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	2 Jenis	Meningkatnya Jumlah Asset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Yang Dibutuhkan	100%	0	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM
5.3.1.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**1.562.028.432**								**1.562.028.432**		
5.3.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	BB; 90 Opini; Persen	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan	1 Jenis	Meningkatnya Pelayanan Jasa Penunjang Kantor	100%	3.000.000	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	BB; 90 Opini; Persen	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan	1 Jenis	Meningkatnya Pelayanan Jasa Penunjang Kantor	100%	3.000.000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM
5.3.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	BB; 90 Opini; Persen	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	4 Item	Meningkatnya Pelayanan Jasa Penunjang Kantor	100%	468.798.400	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	BB; 90 Opini; Persen	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	4 Item	Meningkatnya Pelayanan Jasa Penunjang Kantor	100%	468.798.400	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM
5.3.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	BB; 90 Opini; Persen	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	24 Orang	Meningkatnya Pelayanan Jasa Penunjang Kantor	100%	1.090.230.03 2	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	BB; 90 Opini; Persen	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	24 Orang	Meningkatnya Pelayanan Jasa Penunjang Kantor	100%	1.090.230.03 2	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	SEBELUM PERUBAHAN								SETELAH PERUBAHAN								Keterangan	Perangkat Daerah
				Lokasi	Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Prioritas Pembangunan Nasional	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
5.3.1.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**499.850.000**								**499.850.000**		
5.3.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	BB; 90 Opini; Persen	Jumlah Kendaraan yang Terpelihara dan Terbayar pajaknya	20 Unit	Meningkatnya Kualitas Asset Barang Milik Daerah Daerah Perangkat Daerah Yang Dibutuhkan	100%	127.200.000	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	BB; 90 Opini; Persen	Jumlah Kendaraan yang Terpelihara dan Terbayar pajaknya	20 Unit	Meningkatnya Kualitas Asset Barang Milik Daerah Daerah Perangkat Daerah Yang Dibutuhkan	100%	127.200.000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM
5.3.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	BB; 90 Opini; Persen	Jumlah Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Yang Dibutuhkan	4 Jenis	Meningkatnya Kualitas Asset Barang Milik Daerah Daerah Perangkat Daerah Yang Dibutuhkan	100%	50.150.000	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	BB; 90 Opini; Persen	Jumlah Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Yang Dibutuhkan	4 Jenis	Meningkatnya Kualitas Asset Barang Milik Daerah Daerah Perangkat Daerah Yang Dibutuhkan	100%	50.150.000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM
5.3.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	BB; 90 Opini; Persen	Jumlah gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	Meningkatnya Kualitas Asset Barang Milik Daerah Daerah Perangkat Daerah Yang Dibutuhkan	100%	250.000.000	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	BB; 90 Opini; Persen	Jumlah gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	Meningkatnya Kualitas Asset Barang Milik Daerah Daerah Perangkat Daerah Yang Dibutuhkan	100%	250.000.000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM
5.3.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	BB; 90 Opini; Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Jenis	Meningkatnya Kualitas Asset Barang Milik Daerah Daerah Perangkat Daerah Yang Dibutuhkan	100%	72.500.000	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	BB; 90 Opini; Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Jenis	Meningkatnya Kualitas Asset Barang Milik Daerah Daerah Perangkat Daerah Yang Dibutuhkan	100%	72.500.000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM
5.3.1.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	BB; 90 Opini; Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Jenis	Meningkatnya Kualitas Asset Barang Milik Daerah Daerah Perangkat Daerah Yang Dibutuhkan	100%	0	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	BB; 90 Opini; Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Jenis	Meningkatnya Kualitas Asset Barang Milik Daerah Daerah Perangkat Daerah Yang Dibutuhkan	100%	0	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM
5.3.2	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**										**4.501.676.850**										
5.3.2.2.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**										**853.761.450**										
5.3.2.2.01.2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Persentase Penurunan Indisipliner pegawai; Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian yang disosialisasikan; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja; Persentase ASN yang melaporkan LHKPN dan LHKASN; Persentase ASN berprestasi/berinovasi/tel adan dan berdedikasi yang mendapat penghargaan; Persentase ASN Purna bhakti/ pensiun yang mendapat penghargaan dan tepat waktu; Persentase Pengadaan ASN sesuai kebutuhan formasi pegawai;	3,33; 100; 100; 1,28; 4,23; 0,35 Perse n	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	Meningkatnya Kualitas Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100%	0	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Persentase Penurunan Indisipliner pegawai; Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian yang disosialisasikan; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja; Persentase ASN yang melaporkan LHKPN dan LHKASN; Persentase ASN berprestasi/berinovasi/tel adan dan berdedikasi yang mendapat penghargaan; Persentase ASN Purna bhakti/ pensiun yang mendapat penghargaan dan tepat waktu; Persentase Pengadaan ASN sesuai kebutuhan formasi pegawai;	3,33; 100; 100; 1,28; 4,23; 0,35 Perse n	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	Meningkatnya Kualitas Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100%	0	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	SEBELUM PERUBAHAN							SETELAH PERUBAHAN								Keterangan	Perangkat Daerah
				Lokasi	Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Prioritas Pembangunan Nasional	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
5.3.2.2.01.4	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Persentase Penurunan Indisipliner pegawai; Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian yang disosialisasikan; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja; Persentase ASN yang melaporkan LHKPN dan LHKASN; Persentase ASN berprestasi/berinovasi/tel adan dan berdedikasi yang mendapat penghargaan; Persentase ASN Purna bhakti/ pensiun yang mendapat penghargaan dan tepat waktu; Persentase Pengadaan ASN sesuai kebutuhan formasi pegawai;	3,33; 100; 100; 1,28; 4,23; 0,35 Perse n	Jumlah Pengadaan ASN Sesuai Kebutuhan Formasi Pegawai	393 Orang	Meningkatnya Kualitas Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100%	378.800.050	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Persentase Penurunan Indisipliner pegawai; Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian yang disosialisasikan; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja; Persentase ASN yang melaporkan LHKPN dan LHKASN; Persentase ASN berprestasi/berinovasi/tel adan dan berdedikasi yang mendapat penghargaan; Persentase ASN Purna bhakti/ pensiun yang mendapat penghargaan dan tepat waktu; Persentase Pengadaan ASN sesuai kebutuhan formasi pegawai;	3,33; 100; 100; 1,28; 4,23; 0,35 Perse n	Jumlah Pengadaan ASN Sesuai Kebutuhan Formasi Pegawai	393 Orang	Meningkatnya Kualitas Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100%	1.278.800.050	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM
5.3.2.2.01.7	Evaluasi Pemberhentian ASN	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Persentase Penurunan Indisipliner pegawai; Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian yang disosialisasikan; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja; Persentase ASN yang melaporkan LHKPN dan LHKASN; Persentase ASN berprestasi/berinovasi/tel adan dan berdedikasi yang mendapat penghargaan; Persentase ASN Purna bhakti/ pensiun yang mendapat penghargaan dan tepat waktu; Persentase Pengadaan ASN sesuai kebutuhan formasi pegawai;	3,33; 100; 100; 1,28; 4,23; 0,35 Perse n	Jumlah SK pensiun	450 SK	Meningkatnya Kualitas Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100%	274.965.400	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Persentase Penurunan Indisipliner pegawai; Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian yang disosialisasikan; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja; Persentase ASN yang melaporkan LHKPN dan LHKASN; Persentase ASN berprestasi/berinovasi/tel adan dan berdedikasi yang mendapat penghargaan; Persentase ASN Purna bhakti/ pensiun yang mendapat penghargaan dan tepat waktu; Persentase Pengadaan ASN sesuai kebutuhan formasi pegawai;	3,33; 100; 100; 1,28; 4,23; 0,35 Perse n	Jumlah SK pensiun	450 SK	Meningkatnya Kualitas Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100%	274.965.400	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM
5.3.2.2.01.8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Persentase Penurunan Indisipliner pegawai; Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian yang disosialisasikan; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja; Persentase ASN yang melaporkan LHKPN dan LHKASN; Persentase ASN berprestasi/berinovasi/tel adan dan berdedikasi yang mendapat penghargaan; Persentase ASN Purna bhakti/ pensiun yang mendapat penghargaan dan tepat waktu; Persentase Pengadaan ASN sesuai kebutuhan formasi pegawai;	3,33; 100; 100; 1,28; 4,23; 0,35 Perse n	Jumlah lembaga profesi ASN yang dipasilitasi	1 lembaga	Meningkatnya Kualitas Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100%	0	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Persentase Penurunan Indisipliner pegawai; Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian yang disosialisasikan; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja; Persentase ASN yang melaporkan LHKPN dan LHKASN; Persentase ASN berprestasi/berinovasi/tel adan dan berdedikasi yang mendapat penghargaan; Persentase ASN Purna bhakti/ pensiun yang mendapat penghargaan dan tepat waktu; Persentase Pengadaan ASN sesuai kebutuhan formasi pegawai;	3,33; 100; 100; 1,28; 4,23; 0,35 Perse n	Jumlah lembaga profesi ASN yang dipasilitasi	1 lembaga	Meningkatnya Kualitas Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100%	0	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	SEBELUM PERUBAHAN							SETELAH PERUBAHAN								Keterangan	Perangkat Daerah
				Lokasi	Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Prioritas Pembangunan Nasional	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
5.3.2.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Persentase Penurunan Indisipliner pegawai; Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian yang disosialisasikan; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja; Persentase ASN yang melaporkan LHKPN dan LHKASN; Persentase ASN berprestasi/berinovasi/tel adan dan berdedikasi yang mendapat penghargaan; Persentase ASN Purna bhakti/ pensiun yang mendapat penghargaan dan tepat waktu; Persentase Pengadaan ASN sesuai kebutuhan formasi pegawai;	3,33; 100; 100; 1,28; 4,23; 0,35 Perse n	Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian yang dikelola	2 Sistem	Meningkatnya Kualitas Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100%	199.996.000	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Persentase Penurunan Indisipliner pegawai; Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian yang disosialisasikan; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja; Persentase ASN yang melaporkan LHKPN dan LHKASN; Persentase ASN berprestasi/berinovasi/tel adan dan berdedikasi yang mendapat penghargaan; Persentase ASN Purna bhakti/ pensiun yang mendapat penghargaan dan tepat waktu; Persentase Pengadaan ASN sesuai kebutuhan formasi pegawai;	3,33; 100; 100; 1,28; 4,23; 0,35 Perse n	Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian yang dikelola	2 Sistem	Meningkatnya Kualitas Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100%	199.996.000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM
5.3.2.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Persentase Penurunan Indisipliner pegawai; Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian yang disosialisasikan; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja; Persentase ASN yang melaporkan LHKPN dan LHKASN; Persentase ASN berprestasi/berinovasi/tel adan dan berdedikasi yang mendapat penghargaan; Persentase ASN Purna bhakti/ pensiun yang mendapat penghargaan dan tepat waktu; Persentase Pengadaan ASN sesuai kebutuhan formasi pegawai;	3,33; 100; 100; 1,28; 4,23; 0,35 Perse n	Jumlah Kegiatan pendataan File Elektronik ASN	1 Kegiatan	Meningkatnya Kualitas Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100%	0	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Persentase Penurunan Indisipliner pegawai; Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian yang disosialisasikan; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja; Persentase ASN yang melaporkan LHKPN dan LHKASN; Persentase ASN berprestasi/berinovasi/tel adan dan berdedikasi yang mendapat penghargaan; Persentase ASN Purna bhakti/ pensiun yang mendapat penghargaan dan tepat waktu; Persentase Pengadaan ASN sesuai kebutuhan formasi pegawai;	3,33; 100; 100; 1,28; 4,23; 0,35 Perse n	Jumlah Kegiatan pendataan File Elektronik ASN	1 Kegiatan	Meningkatnya Kualitas Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100%	0	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM
5.3.2.2.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Persentase Penurunan Indisipliner pegawai; Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian yang disosialisasikan; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja; Persentase ASN yang melaporkan LHKPN dan LHKASN; Persentase ASN berprestasi/berinovasi/tel adan dan berdedikasi yang mendapat penghargaan; Persentase ASN Purna bhakti/ pensiun yang mendapat penghargaan dan tepat waktu; Persentase Pengadaan ASN sesuai kebutuhan formasi pegawai;	3,33; 100; 100; 1,28; 4,23; 0,35 Persen	Jumlah Data informasi, dan sistem informasi kepegawaian	6958 oran	Meningkatnya Kualitas Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100%	0	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Persentase Penurunan Indisipliner pegawai; Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian yang disosialisasikan; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja; Persentase ASN yang melaporkan LHKPN dan LHKASN; Persentase ASN berprestasi/berinovasi/tel adan dan berdedikasi yang mendapat penghargaan; Persentase ASN Purna bhakti/ pensiun yang mendapat penghargaan dan tepat waktu; Persentase Pengadaan ASN sesuai kebutuhan formasi pegawai;	3,33; 100; 100; 1,28; 4,23; 0,35 Persen	Jumlah Data informasi, dan sistem informasi kepegawaian	6958 oran	Meningkatnya Kualitas Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100%	0	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	SEBELUM PERUBAHAN								SETELAH PERUBAHAN								Keterangan	Perangkat Daerah
				Lokasi	Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Prioritas Pembangunan Nasional	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Mutasi dan Promosi ASN																				
	Pengelolaan Mutasi ASN	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Persentase Penurunan Indisipliner pegawai; Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian yang disosialisasikan; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja; Persentase ASN yang melaporkan LHKPN dan LHKASN; Persentase ASN berprestasi/berinovasi/tel adan dan berdedikasi yang mendapat penghargaan; Persentase ASN Purna bhakti/ pensiun yang mendapat penghargaan dan tepat waktu; Persentase Pengadaan ASN sesuai kebutuhan formasi pegawai;	3,33; 100; 100; 1,28; 4,23; 0,35 Persen	Jumlah SK Mutasi	10 SK			99.956.000	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Persentase Penurunan Indisipliner pegawai; Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian yang disosialisasikan; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja; Persentase ASN yang melaporkan LHKPN dan LHKASN; Persentase ASN berprestasi/berinovasi/tel adan dan berdedikasi yang mendapat penghargaan; Persentase ASN Purna bhakti/ pensiun yang mendapat penghargaan dan tepat waktu; Persentase Pengadaan ASN sesuai kebutuhan formasi pegawai;	3,33; 100; 100; 1,28; 4,23; 0,35 Persen	Jumlah SK Mutasi	10 SK 100 orang			99.956.000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Persentase Penurunan Indisipliner pegawai; Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian yang disosialisasikan; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja; Persentase ASN yang melaporkan LHKPN dan LHKASN; Persentase ASN berprestasi/berinovasi/tel adan dan berdedikasi yang mendapat penghargaan; Persentase ASN Purna bhakti/ pensiun yang mendapat penghargaan dan tepat waktu; Persentase Pengadaan ASN sesuai kebutuhan formasi pegawai;	3,33; 100; 100; 1,28; 4,23; 0,35 Persen	Jumlah SK Kenaikan Pangkat ASN yang tepat waktu	1300 SK			199.998.550	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Persentase Penurunan Indisipliner pegawai; Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian yang disosialisasikan; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja; Persentase ASN yang melaporkan LHKPN dan LHKASN; Persentase ASN berprestasi/berinovasi/tel adan dan berdedikasi yang mendapat penghargaan; Persentase ASN Purna bhakti/ pensiun yang mendapat penghargaan dan tepat waktu; Persentase Pengadaan ASN sesuai kebutuhan formasi pegawai;	3,33; 100; 100; 1,28; 4,23; 0,35 Persen	Jumlah SK Kenaikan Pangkat ASN yang tepat waktu	1300 SK			199.998.550	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM
	Pengelolaan Promosi ASN	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Persentase Penurunan Indisipliner pegawai; Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian yang disosialisasikan; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja; Persentase ASN yang melaporkan LHKPN dan LHKASN; Persentase ASN berprestasi/berinovasi/tel adan dan berdedikasi yang mendapat penghargaan; Persentase ASN Purna bhakti/ pensiun yang mendapat penghargaan dan tepat waktu; Persentase Pengadaan ASN sesuai kebutuhan formasi pegawai;	3,33; 100; 100; 1,28; 4,23; 0,35 Persen	Jumlah Kegiatan Promosi dan rotasi Jumlah seleksi JPT	5 kegiatan 9 orang			1.629.999.900	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Persentase Penurunan Indisipliner pegawai; Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian yang disosialisasikan; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja; Persentase ASN yang melaporkan LHKPN dan LHKASN; Persentase ASN berprestasi/berinovasi/tel adan dan berdedikasi yang mendapat penghargaan; Persentase ASN Purna bhakti/ pensiun yang mendapat penghargaan dan tepat waktu; Persentase Pengadaan ASN sesuai kebutuhan formasi pegawai;	3,33; 100; 100; 1,28; 4,23; 0,35 Persen	Jumlah Kegiatan Promosi dan rotasi Jumlah seleksi JPT	5 kegiatan 9 orang			1.629.999.900	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	SEBELUM PERUBAHAN								SETELAH PERUBAHAN								Keterangan	Perangkat Daerah
				Lokasi	Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Prioritas Pembangunan Nasional	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Pengembangan Kompetensi ASN																				
5.3.2.2.03.1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Persentase Penurunan Indisipliner pegawai; Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian yang disosialisasikan; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja; Persentase ASN yang melaporkan LHKPN dan LHKASN; Persentase ASN berprestasi/berinovasi/tel adan dan berdedikasi yang mendapat penghargaan; Persentase ASN Purna bhakti/ pensiun yang mendapat penghargaan dan tepat waktu; Persentase Pengadaan ASN sesuai kebutuhan formasi pegawai;	3,33; 100; 100; 1,28; 4,23; 0,35 Persen	Jumlah peserta yang mengikuti UPKP	135 ASN			139.999.850	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Persentase Penurunan Indisipliner pegawai; Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian yang disosialisasikan; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja; Persentase ASN yang melaporkan LHKPN dan LHKASN; Persentase ASN berprestasi/berinovasi/tel adan dan berdedikasi yang mendapat penghargaan; Persentase ASN Purna bhakti/ pensiun yang mendapat penghargaan dan tepat waktu; Persentase Pengadaan ASN sesuai kebutuhan formasi pegawai;	3,33; 100; 100; 1,28; 4,23; 0,35 Persen	Jumlah peserta yang mengikuti UPKP	135 ASN			139.999.850	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM
5.3.2.2.03.2	Pengelolaan Assessment Center	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Persentase Penurunan Indisipliner pegawai; Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian yang disosialisasikan; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja; Persentase ASN yang melaporkan LHKPN dan LHKASN; Persentase ASN berprestasi/berinovasi/tel adan dan berdedikasi yang mendapat penghargaan; Persentase ASN Purna bhakti/ pensiun yang mendapat penghargaan dan tepat waktu; Persentase Pengadaan ASN sesuai kebutuhan formasi pegawai;	3,33; 100; 100; 1,28; 4,23; 0,35 Persen	Jumlah ASN yang mengikuti assessment Center	400 ASN			249.999.900	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Persentase Penurunan Indisipliner pegawai; Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian yang disosialisasikan; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja; Persentase ASN yang melaporkan LHKPN dan LHKASN; Persentase ASN berprestasi/berinovasi/tel adan dan berdedikasi yang mendapat penghargaan; Persentase ASN Purna bhakti/ pensiun yang mendapat penghargaan dan tepat waktu; Persentase Pengadaan ASN sesuai kebutuhan formasi pegawai;	3,33; 100; 100; 1,28; 4,23; 0,35 Persen	Jumlah ASN yang mengikuti assessment Center	400 ASN			249.999.900	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM
5.3.2.2.03.3	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Persentase Penurunan Indisipliner pegawai; Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian yang disosialisasikan; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja; Persentase ASN yang melaporkan LHKPN dan LHKASN; Persentase ASN berprestasi/berinovasi/tel adan dan berdedikasi yang mendapat penghargaan; Persentase ASN Purna bhakti/ pensiun yang mendapat penghargaan dan tepat waktu; Persentase Pengadaan ASN sesuai kebutuhan formasi pegawai;	3,33; 100; 100; 1,28; 4,23; 0,35 Persen	Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Diklat Manajerial dan Teknis yang dipelihara	1 Sistem			0	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Persentase Penurunan Indisipliner pegawai; Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian yang disosialisasikan; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja; Persentase ASN yang melaporkan LHKPN dan LHKASN; Persentase ASN berprestasi/berinovasi/tel adan dan berdedikasi yang mendapat penghargaan; Persentase ASN Purna bhakti/ pensiun yang mendapat penghargaan dan tepat waktu; Persentase Pengadaan ASN sesuai kebutuhan formasi pegawai;	3,33; 100; 100; 1,28; 4,23; 0,35 Persen	Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Diklat Manajerial dan Teknis yang dipelihara	1 Sistem			0	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	SEBELUM PERUBAHAN							SETELAH PERUBAHAN								Keterangan	Perangkat Daerah
				Lokasi	Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Prioritas Pembangunan Nasional	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
5.3.2.2.03.4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Persentase Penurunan Indisipliner pegawai; Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian yang disosialisasikan; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja; Persentase ASN yang melaporkan LHKPN dan LHKASN; Persentase ASN berprestasi/berinovasi/tel adan dan berdedikasi yang mendapat penghargaan; Persentase ASN Purna bhakti/ pensiun yang mendapat penghargaan dan tepat waktu; Persentase Pengadaan ASN sesuai kebutuhan formasi pegawai;	3,33; 100; 100; 1,28; 4,23; 0,35 Persen	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan Lanjutan (tugas belajar dan ijin belajar)	8 orang			227.962.950	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Persentase Penurunan Indisipliner pegawai; Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian yang disosialisasikan; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja; Persentase ASN yang melaporkan LHKPN dan LHKASN; Persentase ASN berprestasi/berinovasi/tel adan dan berdedikasi yang mendapat penghargaan; Persentase ASN Purna bhakti/ pensiun yang mendapat penghargaan dan tepat waktu; Persentase Pengadaan ASN sesuai kebutuhan formasi pegawai;	3,33; 100; 100; 1,28; 4,23; 0,35 Persen	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan Lanjutan (tugas belajar dan ijin belajar)	8 orang			227.962.950	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM
5.3.2.2.03.8	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Persentase Penurunan Indisipliner pegawai; Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian yang disosialisasikan; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja; Persentase ASN yang melaporkan LHKPN dan LHKASN; Persentase ASN berprestasi/berinovasi/tel adan dan berdedikasi yang mendapat penghargaan; Persentase ASN Purna bhakti/ pensiun yang mendapat penghargaan dan tepat waktu; Persentase Pengadaan ASN sesuai kebutuhan formasi pegawai;	3,33; 100; 100; 1,28; 4,23; 0,35 Persen	Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Fungsional yang dipelihara	1 Sistem			0	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Persentase Penurunan Indisipliner pegawai; Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian yang disosialisasikan; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja; Persentase ASN yang melaporkan LHKPN dan LHKASN; Persentase ASN berprestasi/berinovasi/tel adan dan berdedikasi yang mendapat penghargaan; Persentase ASN Purna bhakti/ pensiun yang mendapat penghargaan dan tepat waktu; Persentase Pengadaan ASN sesuai kebutuhan formasi pegawai;	3,33; 100; 100; 1,28; 4,23; 0,35 Persen	Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Fungsional yang dipelihara	1 Sistem			0	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM
5.3.2.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Persentase Penurunan Indisipliner pegawai; Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian yang disosialisasikan; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja; Persentase ASN yang melaporkan LHKPN dan LHKASN; Persentase ASN berprestasi/berinovasi/tel adan dan berdedikasi yang mendapat penghargaan; Persentase ASN Purna bhakti/ pensiun yang mendapat penghargaan dan tepat waktu; Persentase Pengadaan ASN sesuai kebutuhan formasi pegawai;	3,33; 100; 100; 1,28; 4,23; 0,35 Persen	Jumlah peserta yang mengikuti diklat kompetensi Jabatan Fungsional	11 Orang			49.998.950	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Persentase Penurunan Indisipliner pegawai; Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian yang disosialisasikan; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja; Persentase ASN yang melaporkan LHKPN dan LHKASN; Persentase ASN berprestasi/berinovasi/tel adan dan berdedikasi yang mendapat penghargaan; Persentase ASN Purna bhakti/ pensiun yang mendapat penghargaan dan tepat waktu; Persentase Pengadaan ASN sesuai kebutuhan formasi pegawai;	3,33; 100; 100; 1,28; 4,23; 0,35 Persen	Jumlah peserta yang mengikuti diklat kompetensi Jabatan Fungsional	11 Orang			49.998.950	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	SEBELUM PERUBAHAN							SETELAH PERUBAHAN								Keterangan	Perangkat Daerah
				Lokasi	Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Prioritas Pembangunan Nasional	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
5.3.2.2.03.15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Persentase Penurunan Indisipliner pegawai; Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian yang disosialisasikan; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja; Persentase ASN yang melaporkan LHKPN dan LHKASN; Persentase ASN berprestasi/berinovasi/tel adan dan berdedikasi yang mendapat penghargaan; Persentase ASN Purna bhakti/ pensiun yang mendapat penghargaan dan tepat waktu; Persentase Pengadaan ASN sesuai kebutuhan formasi pegawai;	3,33; 100; 100; 1,28; 4,23; 0,35 Persen	Jumlah Jabatan Fungsional yang dievaluasi	10 Jabatan Fungsional			0	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Persentase Penurunan Indisipliner pegawai; Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian yang disosialisasikan; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja; Persentase ASN yang melaporkan LHKPN dan LHKASN; Persentase ASN berprestasi/berinovasi/tel adan dan berdedikasi yang mendapat penghargaan; Persentase ASN Purna bhakti/ pensiun yang mendapat penghargaan dan tepat waktu; Persentase Pengadaan ASN sesuai kebutuhan formasi pegawai;	3,33; 100; 100; 1,28; 4,23; 0,35 Persen	Jumlah Jabatan Fungsional yang dievaluasi	10 Jabatan Fungsional			0	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																				
5.3.2.2.04.3	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Persentase Penurunan Indisipliner pegawai; Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian yang disosialisasikan; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja; Persentase ASN yang melaporkan LHKPN dan LHKASN; Persentase ASN berprestasi/berinovasi/tel adan dan berdedikasi yang mendapat penghargaan; Persentase ASN Purna bhakti/ pensiun yang mendapat penghargaan dan tepat waktu; Persentase Pengadaan ASN sesuai kebutuhan formasi pegawai;	3,33; 100; 100; 1,28; 4,23; 0,35 Persen	Jumlah Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5 kegiatan	Jumlah Sistem Aplikasi Kinerja	2 Paket	499.999.850	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Persentase Penurunan Indisipliner pegawai; Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian yang disosialisasikan; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja; Persentase ASN yang melaporkan LHKPN dan LHKASN; Persentase ASN berprestasi/berinovasi/tel adan dan berdedikasi yang mendapat penghargaan; Persentase ASN Purna bhakti/ pensiun yang mendapat penghargaan dan tepat waktu; Persentase Pengadaan ASN sesuai kebutuhan formasi pegawai;	3,33; 100; 100; 1,28; 4,23; 0,35 Persen	Jumlah Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Paket			499.999.850	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM
5.3.2.2.04.4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Persentase Penurunan Indisipliner pegawai; Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian yang disosialisasikan; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja; Persentase ASN yang melaporkan LHKPN dan LHKASN; Persentase ASN berprestasi/berinovasi/tel adan dan berdedikasi yang mendapat penghargaan; Persentase ASN Purna bhakti/ pensiun yang mendapat penghargaan dan tepat waktu; Persentase Pengadaan ASN sesuai kebutuhan formasi pegawai;	3,33; 100; 100; 1,28; 4,23; 0,35 Persen	Jumlah Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5 kegiatan	Jumlah ASN yang mendapat Penghargaan	500 Orang	0	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Persentase Penurunan Indisipliner pegawai; Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian yang disosialisasikan; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja; Persentase ASN yang melaporkan LHKPN dan LHKASN; Persentase ASN berprestasi/berinovasi/tel adan dan berdedikasi yang mendapat penghargaan; Persentase ASN Purna bhakti/ pensiun yang mendapat penghargaan dan tepat waktu; Persentase Pengadaan ASN sesuai kebutuhan formasi pegawai;	3,33; 100; 100; 1,28; 4,23; 0,35 Persen	Jumlah Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	500 Orang			0	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	SEBELUM PERUBAHAN								SETELAH PERUBAHAN								Keterangan	Perangkat Daerah
				Lokasi	Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Prioritas Pembangunan Nasional	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
5.3.2.2.04.5	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Persentase Penurunan Indisipliner pegawai; Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian yang disosialisasikan; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja; Persentase ASN yang melaporkan LHKPN dan LHKASN; Persentase ASN berprestasi/berinovasi/tel adan dan berdedikasi yang mendapat penghargaan; Persentase ASN Purna bhakti/ pensiun yang mendapat penghargaan dan tepat waktu; Persentase Pengadaan ASN sesuai kebutuhan formasi pegawai;	3,33; 100; 100; 1,28; 4,23; 0,35 Persen	Jumlah Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5 kegiatan	Jumlah ASN yang mendapatkan Tanda Jasa	100 Orang	0	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Persentase Penurunan Indisipliner pegawai; Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian yang disosialisasikan; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja; Persentase ASN yang melaporkan LHKPN dan LHKASN; Persentase ASN berprestasi/berinovasi/tel adan dan berdedikasi yang mendapat penghargaan; Persentase ASN Purna bhakti/ pensiun yang mendapat penghargaan dan tepat waktu; Persentase Pengadaan ASN sesuai kebutuhan formasi pegawai;	3,33; 100; 100; 1,28; 4,23; 0,35 Persen	Jumlah Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100 Orang			0	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM
5.3.2.2.04.7	Pembinaan Disiplin ASN	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Persentase Penurunan Indisipliner pegawai; Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian yang disosialisasikan; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja; Persentase ASN yang melaporkan LHKPN dan LHKASN; Persentase ASN berprestasi/berinovasi/tel adan dan berdedikasi yang mendapat penghargaan; Persentase ASN Purna bhakti/ pensiun yang mendapat penghargaan dan tepat waktu; Persentase Pengadaan ASN sesuai kebutuhan formasi pegawai;	3,33; 100; 100; 1,28; 4,23; 0,35 Persen	Jumlah Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5 kegiatan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	7 Kegiatan	449.999.850	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Persentase Penurunan Indisipliner pegawai; Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian yang disosialisasikan; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja; Persentase ASN yang melaporkan LHKPN dan LHKASN; Persentase ASN berprestasi/berinovasi/tel adan dan berdedikasi yang mendapat penghargaan; Persentase ASN Purna bhakti/ pensiun yang mendapat penghargaan dan tepat waktu; Persentase Pengadaan ASN sesuai kebutuhan formasi pegawai;	3,33; 100; 100; 1,28; 4,23; 0,35 Persen	Jumlah Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	7 Kegiatan			449.999.850	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM
5.3.2.2.04.8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Persentase Penurunan Indisipliner pegawai; Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian yang disosialisasikan; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja; Persentase ASN yang melaporkan LHKPN dan LHKASN; Persentase ASN berprestasi/berinovasi/tel adan dan berdedikasi yang mendapat penghargaan; Persentase ASN Purna bhakti/ pensiun yang mendapat penghargaan dan tepat waktu; Persentase Pengadaan ASN sesuai kebutuhan formasi pegawai;	3,33; 100; 100; 1,28; 4,23; 0,35 Persen	Jumlah Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5 kegiatan	Jumlah penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	29 ASN	99.999.600	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Persentase Penurunan Indisipliner pegawai; Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian yang disosialisasikan; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja; Persentase ASN yang melaporkan LHKPN dan LHKASN; Persentase ASN berprestasi/berinovasi/tel adan dan berdedikasi yang mendapat penghargaan; Persentase ASN Purna bhakti/ pensiun yang mendapat penghargaan dan tepat waktu; Persentase Pengadaan ASN sesuai kebutuhan formasi pegawai;	3,33; 100; 100; 1,28; 4,23; 0,35 Persen	Jumlah Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	29 ASN			99.999.600	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	SEBELUM PERUBAHAN								SETELAH PERUBAHAN								Keterangan	Perangkat Daerah
				Lokasi	Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Prioritas Pembangunan Nasional	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
5.4	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**																				
5.4.2	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**																				
5.4.2.2.01.3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Persentase Calon ASN yang telah mengikuti Pelatihan Dasar; Persentase ASN yang diklat fungsional/ teknis/ bimtek/ seminar / lokakarya dan Tugas Belajar; Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	100; 1,53; 12,15 Persen	Jumlah kegiatan pengembangan kompetensi teknis	1 Kegiatan	jumlah peserta yang mengikuti diklat teknis	120 Orang	0	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Persentase Calon ASN yang telah mengikuti Pelatihan Dasar; Persentase ASN yang diklat fungsional/ teknis/ bimtek/ seminar / lokakarya dan Tugas Belajar; Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	100; 1,53; 12,15 Persen	Jumlah kegiatan pengembangan kompetensi teknis	120 Orang			0	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM
5.4.2.2.02	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**																				
5.4.2.2.02.7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Persentase Calon ASN yang telah mengikuti Pelatihan Dasar; Persentase ASN yang diklat fungsional/ teknis/ bimtek/ seminar / lokakarya dan Tugas Belajar; Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	100; 1,53; 12,15 Persen	Jumlah Peserta pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	338 orang	Jumlah peserta Diklat Latsar Jumlah Peserta Yang Mengikuti Diklat kepemimpinan dan diklatprajabatan	393 Orang 20 Orang	2.736.920.000	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh				393 Orang 20 Orang			2.736.920.000		BKPSDM
											48.002.957.632								**48.927.957.632**		

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 ini merupakan Perubahan Rencana Kerja Tahunan berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2022 dan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 s/d 2023 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta serta target dan sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

Adapun kaidah pelaksanaan kegiatan BKPSDM Kabupaten Purwakarta didasarkan pada UU No. 5 Tahun 2015 tentang aparatur sipil negara, UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 tentang manjemen PNS, Peraturan Presiden No. 12 tahun 1961 tentang pemberian tugas belajar dan Permendagri 85 tahun 2017 tentang pendidikan dan pelatihan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri.

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 maka penetapan prioritas pembangunan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis sebagai perwujudan kinerja pemerintah yang baik dan akuntabel.